

**ANALISIS PEMBENTUKAN DANANTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
MANIPULASI HARGA EKSPOR KOMODITAS DI INDONESIA: STUDI KASUS  
PADA INDUSTRI CPO INDONESIA TAHUN 2026**

Andini Rahayu Putri<sup>1</sup>, Dimas Saragih<sup>2</sup>, Febry Tarigan<sup>3</sup>, Rizqi Alhaq Nasution<sup>4</sup>,  
Yanri Girsang<sup>5</sup>, Putri Kemala Dewi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Manajemen FE Universitas Negeri Medan

<sup>1</sup>ptriandin7@gmail.com, <sup>2</sup>saragihdimas350@gmail.com,

<sup>3</sup>febrytrgn0603@gmail.com, <sup>4</sup>ralhaqng@gmail.com, <sup>5</sup>yanrigirsang@gmail.com,

<sup>6</sup>putrikemala@unimed.ac.id

**ABSTRACT**

*Indonesia is one of the largest commodity-producing countries in the world, particularly in the Crude Palm Oil (CPO) sector, which contributes significantly to national economic growth and foreign exchange earnings. However, the high volume of CPO exports has also created various problems in international trade governance, especially related to export price manipulation practices such as under invoicing and transfer pricing. These practices potentially reduce state revenue from taxes and export duties. This study aims to analyze the establishment of Danantara as a government strategy to prevent export price manipulation in Indonesia's CPO industry in 2026. The research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach by collecting secondary data from books, journals, government reports, and relevant scientific articles. The results of the study indicate that the establishment of Danantara represents the government's effort to strengthen supervision of export commodity trade through increasing transparency, improving coordination among institutions, and monitoring international trade transactions more effectively. The study also finds that stronger supervision is needed to minimize transfer pricing practices and improve state revenue from the export sector. Therefore, Danantara is expected to become an important instrument in improving the governance of commodity exports in Indonesia in a more transparent, accountable, and efficient manner.*

**Keywords:** *Danantara, export price manipulation, Crude Palm Oil (CPO)*

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas terbesar di dunia, khususnya pada sektor Crude Palm Oil (CPO) yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa negara. Namun, tingginya aktivitas ekspor CPO juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam tata kelola perdagangan internasional, terutama terkait praktik manipulasi harga ekspor seperti under invoicing dan transfer pricing. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan Danantara sebagai strategi pemerintah dalam mencegah manipulasi harga ekspor pada industri CPO Indonesia tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal,

laporan pemerintah, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Danantara merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan perdagangan ekspor komoditas melalui peningkatan transparansi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pengawasan transaksi perdagangan internasional secara lebih efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk meminimalkan praktik transfer pricing dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor. Dengan demikian, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola ekspor komoditas Indonesia secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Kata Kunci: Danantara, manipulasi harga ekspor, Crude Palm Oil (CPO)

### **A. Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil komoditas terbesar di dunia, terutama pada sektor kelapa sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO). Industri CPO memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional karena memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara, peningkatan pendapatan nasional, serta penyerapan tenaga kerja. Posisi Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara (Pahan, 2012). Namun, tingginya aktivitas ekspor komoditas tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan dalam tata kelola perdagangan internasional, khususnya terkait praktik manipulasi harga ekspor yang dapat merugikan negara.

Manipulasi harga ekspor merupakan tindakan yang dilakukan

dengan cara melaporkan nilai transaksi tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Praktik ini umumnya dilakukan melalui *under invoicing* dan *transfer pricing*, yaitu pengalihan keuntungan ke perusahaan afiliasi di luar negeri untuk mengurangi beban pajak dan memperkecil nilai ekspor yang tercatat di dalam negeri. Pada industri CPO Indonesia, praktik tersebut menjadi perhatian serius karena melibatkan transaksi ekspor bernilai besar dan jaringan perdagangan internasional yang kompleks. Akibatnya, negara dapat mengalami penurunan penerimaan pajak, berkurangnya devisa, serta lemahnya transparansi perdagangan komoditas (Suandy, 2017).

Permasalahan tersebut mendorong pemerintah Indonesia pada tahun 2026 membentuk Danantara sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas nasional.

Pembentukan Danantara diharapkan mampu meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik manipulasi harga ekspor, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Kehadiran Danantara juga menjadi bentuk upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perdagangan internasional agar lebih akuntabel dan efisien, khususnya pada industri CPO yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Secara teoritis, praktik manipulasi harga ekspor berkaitan dengan teori penghindaran pajak (*tax avoidance theory*) dan teori keagenan (*agency theory*), di mana perusahaan cenderung mencari keuntungan maksimal dengan memanfaatkan kelemahan regulasi yang ada. Selain itu, teori *good governance* menjelaskan pentingnya pengawasan pemerintah dalam menciptakan sistem perdagangan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, pembentukan Danantara dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan perdagangan ekspor komoditas strategis di Indonesia.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa pengawasan ekspor komoditas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan data nilai ekspor antara Indonesia dan negara tujuan perdagangan sering menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan transaksi. Selain itu, penggunaan perusahaan perantara di luar negeri menyebabkan nilai ekspor yang tercatat lebih rendah dibandingkan harga pasar sebenarnya. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan menurunkan efektivitas pengelolaan perdagangan ekspor nasional (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pembentukan Danantara dalam upaya pencegahan manipulasi harga ekspor komoditas di Indonesia dengan studi kasus pada industri CPO tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pembentukan Danantara, mengidentifikasi bentuk manipulasi harga ekspor pada industri CPO, serta menganalisis peran Danantara dalam meningkatkan pengawasan perdagangan komoditas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi dan perdagangan internasional, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengawasan ekspor yang lebih efektif dan transparan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pembentukan Danantara sebagai upaya pemerintah dalam mencegah manipulasi harga ekspor komoditas di Indonesia, khususnya pada industri Crude Palm Oil (CPO) tahun 2026. Melalui metode deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena, kondisi, serta permasalahan yang terjadi secara sistematis berdasarkan fakta dan data yang diperoleh.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel berita, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan

perdagangan internasional, manipulasi harga ekspor, transfer pricing, dan pembentukan Danantara. Data-data tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai kondisi tata kelola ekspor komoditas di Indonesia dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi praktik manipulasi harga ekspor.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menelaah teori-teori yang berkaitan dengan tata kelola perdagangan internasional, *good governance*, *agency theory*, serta *tax avoidance theory* untuk memperkuat analisis penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dan informasi dari media massa serta dokumen resmi pemerintah sebagai pendukung dalam menggambarkan fenomena yang terjadi pada industri CPO Indonesia tahun 2026.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Selanjutnya, data

dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan Danantara, bentuk praktik manipulasi harga ekspor pada industri CPO, serta peran Danantara dalam meningkatkan pengawasan dan transparansi perdagangan komoditas nasional. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai upaya pemerintah dalam mencegah manipulasi harga ekspor di Indonesia.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Danantara pada tahun 2026 merupakan bentuk respons pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya permasalahan manipulasi harga ekspor komoditas, khususnya pada sektor Crude Palm Oil (CPO). Industri CPO dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Tingginya nilai perdagangan pada sektor ini menyebabkan industri CPO rentan terhadap praktik penyimpangan dalam perdagangan internasional, seperti

under invoicing dan transfer pricing (Rahayu et al., 2019).

Praktik under invoicing dilakukan dengan cara melaporkan nilai ekspor di bawah harga pasar sebenarnya sehingga jumlah pajak dan pungutan ekspor yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Selain itu, transfer pricing dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri dengan tujuan mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Dalam praktiknya, perusahaan eksportir menjual produk CPO kepada perusahaan afiliasi dengan harga rendah, kemudian perusahaan tersebut menjual kembali produk ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan keuntungan yang seharusnya tercatat di Indonesia berpindah ke luar negeri sehingga mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak dan devisa ekspor (Trihudiyatmanto, 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan perdagangan ekspor di Indonesia. Perbedaan data perdagangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor menjadi salah satu indikasi adanya ketidaksesuaian pelaporan transaksi.

Dalam beberapa kasus, nilai impor yang tercatat di negara tujuan lebih besar dibandingkan nilai ekspor yang dilaporkan di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan adanya potensi manipulasi harga ekspor yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak dan beban pungutan ekspor (Santoso, 2020).

Pembentukan Danantara dipandang sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan perdagangan komoditas nasional. Danantara dibentuk untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat pengendalian transaksi ekspor, serta memperbaiki koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pengawasan perdagangan internasional dan perpajakan. Keberadaan Danantara diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi sehingga praktik manipulasi harga ekspor dapat diminimalkan secara lebih efektif.

Dalam pelaksanaannya, Danantara memiliki fungsi untuk memantau kesesuaian nilai transaksi ekspor dengan harga pasar internasional serta mengawasi aktivitas perusahaan yang terindikasi

melakukan transfer pricing melalui perusahaan afiliasi di luar negeri. Pengawasan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan perdagangan secara lebih cepat dan meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekspor komoditas strategis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks perdagangan internasional, lemahnya pengawasan dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penyimpangan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, pembentukan Danantara menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan ekspor melalui sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, hasil penelitian juga relevan dengan agency theory yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan devisa ekspor, sedangkan perusahaan berusaha

memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya, termasuk kewajiban perpajakan. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong sebagian perusahaan melakukan manipulasi harga ekspor melalui berbagai strategi perdagangan internasional (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian ini juga didukung oleh teori tax avoidance yang menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal maupun semi legal. Transfer pricing menjadi salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan multinasional untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Akibatnya, negara penghasil komoditas mengalami penurunan potensi penerimaan pajak yang cukup signifikan (Suandy, 2017).

Meskipun pembentukan Danantara dinilai sebagai langkah positif, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan. Kompleksitas perdagangan internasional, penggunaan perusahaan afiliasi lintas negara, serta keterbatasan akses data perdagangan global menjadi hambatan dalam proses pengawasan.

Selain itu, pengawasan terhadap manipulasi harga ekspor memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem teknologi informasi yang mampu mendeteksi penyimpangan transaksi secara cepat dan akurat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Danantara merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat pengawasan ekspor komoditas dan mencegah praktik manipulasi harga ekspor pada industri CPO. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi perdagangan internasional, mengurangi praktik transfer pricing dan under invoicing, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, tata kelola perdagangan komoditas Indonesia diharapkan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Danantara pada tahun

2026 merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat pengawasan perdagangan ekspor komoditas, khususnya pada industri Crude Palm Oil (CPO). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik manipulasi harga ekspor, seperti under invoicing dan transfer pricing, yang menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak dan devisa ekspor. Praktik tersebut terjadi melalui pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga pasar sebenarnya serta pengalihan keuntungan ke perusahaan afiliasi di luar negeri untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan perdagangan internasional menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya manipulasi harga ekspor pada industri CPO Indonesia. Perbedaan data perdagangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian pelaporan transaksi yang berpotensi merugikan negara. Dalam kondisi tersebut, pembentukan Danantara diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan, terintegrasi,

dan akuntabel dalam pengendalian aktivitas ekspor komoditas strategis.

Berdasarkan teori good governance, keberadaan Danantara mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola perdagangan internasional. Selain itu, teori agency dan tax avoidance menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan kelemahan regulasi untuk memperoleh keuntungan maksimal melalui praktik manipulasi transaksi perdagangan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan melalui Danantara menjadi langkah penting untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam perdagangan ekspor komoditas.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas perdagangan internasional, keterbatasan akses data lintas negara, serta kebutuhan terhadap sumber daya manusia dan teknologi pengawasan yang memadai. Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga pemerintah, efektivitas sistem pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum terhadap

pelanggaran perdagangan internasional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan perdagangan ekspor melalui integrasi data perdagangan, peningkatan kerja sama internasional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan transaksi ekspor komoditas. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang perpajakan dan perdagangan internasional agar proses pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas implementasi Danantara dalam jangka panjang serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan penerimaan negara dan stabilitas perdagangan komoditas Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arwansyah. (2019). Pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 112–120.
- Halim, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Maipita, I. (2020). *Kebijakan ekonomi dan pembangunan Indonesia*. Medan: Unimed Press.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Pahan, I. (2012). *Panduan lengkap kelapa sawit: Manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rahmadana, M. F. (2021). *Ekonomi internasional dan perdagangan global*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Rahayu, E., Norisanti, N., & Samsudin, A. (2019). Pengendalian persediaan bahan baku dalam proses produksi dengan menggunakan metode economic order quantity (EOQ). *Journal of Management and Business (JOMB)*, 1(3).
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan pajak* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Trihudyatmanto, M. (2018). Analisis pencegahan transfer pricing dalam upaya mengurangi praktik penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5(2), 45–57.